BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah. Seharusnya hal tersebut memungkinkan Indonesia menjadi negara yang maju. Namun kenyataan yang ada sangat jauh berbeda. Negara kita masih tergolong negara yang masih dalam proses berkembang. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk memajukan negara kita. Tetapi pelaksanaannya kurang mendapat dukungan yang positif. Anggaran-anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidak dijaga dengan baik. Sehingga banyak terjadi penyelewengan dan penyalagunaan. Tindakan inilah yang disebut dengan korupsi. Demi keuntungan beberapa pihak, banyak rakyat yang dikorbankan. Negara merugi hingga puluhan triliyun. Padahal jika dimanfaatkan dengan baik, anggaran tersebut pasti telah menuntaskan angka kemiskinan di Indonesia.

Indikasi tingginya tingkat korupsi di Indonesia ditunjukkan oleh beberapa hasil survei yang telah dilakukan oleh lembaga Transparency International (TI). Pada tahun 2011 lalu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebesar 3,0 dimana angka tersebut masih di bawah negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura (9,2), Brunei (5,2), Malaysia (4,3), dan Thailand (3,4). Untuk peringkat, Indonesia berada di urutan ke-100 dari 182 negara.[1] Namun terjadi penurunan pada tahun berikutnya. Diharapkan indeks tersebut akan terus menurun dengan semakin tingginya tingkat kewaspadaan masyarakat untuk

[1]Ary Wibowo, "Indonesia Peringkat ke-100 Indeks Persepsi Korupsi 2011", www.nasional.kompas.com, (29 Desember 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikut serta dalam mengawasi penggunaan APBN sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Indonesia sesungguhnya telah memiliki sebuah badan yang mengurus semua kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[2] Dari awal terbentuknya hingga kini, telah banyak kasus-kasus tindak pidana korupsi berhasil disidangkan dan sang pelaku telah mendapatkan hukuman yang sesuai. Namun hal itu tidak pernah membuat jerah para pelaku lainnya. Hingga menghalalkan cara-cara lain untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Problematika korupsi yang sudah mengakar, membudaya serta sudah menjadi cara pikir, dan mental. Penanganan problematika korupsi harus dilakukan dengan cara yang lebih komprehensif dan pencegahan (preventif) sejak dini, karena salah satu sebab terjadinya korupsi adalah sudah mengakarnya mental korupsi di kalangan masyarakata indonesia. Dan salah satu cara Untuk melakukan pencegahan mental korupsi sejak dini adalah lewat jalur pendidikan.[3]

Pada pemeritahan presiden kelima, Susilo Bambang Yudhoyono, menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasn Korupsi Tahun 2012. Sebagai tambahan, pemerintah juga memasukkan upaya baru, yakni pendidikan dan budaya antikorupsi. Fokusnya berupa pendidikan karakter bangsa berintegritas antikorupsi. Selain itu, kerja sama

---

[2] http://www.kpk.go.id, (31 Desember 2013).

[3] Harlina Helmanita, dkk., *Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam, (*Jakarta: for the Study of Religion and Culture (CSRC) Pusat Kajian Agama dan Budaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif,2006), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerapkan Pendidikan Antikorupsi dalam kurikulum sekolah mulai tahun ajaran 2012/2013 seolah menemukan momentumnya di tengah menjamurnya praktik korupsi di Indonesia.[4]

Pendidikan anti korupsi dinilai sangat penting dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Pendekatan yang diutamakan dalam pendidikan anti korupsi adalah pendidikan berkarakter, dimana pembentukan karakter adalah tujuan utama. Secara simplistik memang sektor pendidikan formal di Indonesia dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah preventif (pencegahan) tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan (approach), pertama: menjadikan peserta didik sebagai target, dan kedua: menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak permissive to corruption.[5] Pada pendidikan formal, pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan pada pelajaran PKn dan Pendidikan Agama.

Pendidikan Agama, khususnya Pendidikan Agama Islam sebagai bagian integral dari pendidikan Indonesia tentunya mempunyai peranan penting dalam mengembangkan nilai antikorupsi. Pendidikan Islam bisa dijadikan sebagai sarana upaya preventif dan antisipatif dalam mengembangkan nilai antikorupsi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.[6] Di dalam Islam diajarkan

---

[4] Siti Nurkasanah, "Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sma Negeri 1 Kasihan Bantul", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), 5.

[5] Lukman Hakim, " Model Intergrasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim,* vol. 10, no. 2, (2012), 144.

[6] Abdulloh Hadziq, "Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran PAI Di Sekolah (Studi Kasus Di Sekolah Menengah Atas Negeri 03 Semarang)", (Skripsi -- Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009) 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai tuntunan tentang berakhlak mulia. Akhlak yang mulia akan membuat seorang manusia terhindar dari segala perbuatan yang tercela. Penanaman nilai-nilai dari akhlak mulia itu pun harus dilakukan sedini mungkin. Siswa juga harus dituntun untuk membiasakan diri dalam menerapkan akhlak mulia di setiap perbuatannya. Sebagai langkah awal, perlu adanya sebuah kajian khusus pada materi Pendidikan Agama Islam yang mengintegrasikan pendidikan anti Korupsi di dalamnya.

Sebagai tindak lanjut dalam menanggapi hal tersebut, diterbitkan juga keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1696 Tahun 2013 tentang panduan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di madrasah tahun 2013. Panduan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah ini bertujuan memberikan arah, rujukan dan panduan bagi pengelola dan guru madrasah untuk merancang pengitegrasian materi anti korupsi ke dalam pembelajaran. Selain itu panduan ini juga memberikan arahan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi baik melalui pembinaan kesiswaan dan ekstra kurikuler dan pengembangan pendidikan anti korupsi di madrasah. [7]

Menag Suryadharma Ali menegaskan bahwa madrasah dan pesantren mempunyai posisi penting dalam pendidikan akhlak. Berdiri sejak Indonesia belum merdeka, kedua lembaga pendidikan Islam ini telah memberikan kontribusi

[7] Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1696 Tahun 2013, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah,* 2013. 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar dalam pembangunan karakter bangsa.[8] Akhlak manusia dalam bahasa umumnya disebut dengan moral. Oleh karena itu, pondok pesantren dan madrash harus memiliki kontribusi yang besar dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan cara mengimplementasikan pendidikan anti korupsi dalam kegiatan belajar mengajar mereka. Sistem pembelajarannya dapat dilaksanakan sesuai dengan panduan yang dibuat oleh Sekjen Pendidikan Agama Islam. Namun setiap madrasah dan pondok pesantren memiliki kewenangan dan hak untuk menentukan sistem penerapan pendidikan anti korupsi yang dirasa sesuai dengan keadaan para santrinya. Oleh karena itu, kemungkinan perbedaan dalam penerapan pendidikan anti korupsi tentu ada.

Pada penelitian sebelumnya, telah diteliti sistem pendidikan anti korupsi pada sekolah-sekolah umum (SMP dan SMA). Namun belum ditemukan penelitian tentang pendidikan anti korupsi di madrasah (madrasah ibtidaiyah hingga aliyah). Terlebih penelitian-penelitian sebelumnya hanya meneliti tentang strategi pihak sekolah dalam menerapkan pendidikan anti korupsi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan pendidikan anti korupsi tersebut hingga dampaknya terhadap moral siswa atau santri. Sebagai tambahan peneliti juga melakukan studi banding antara dua madrasah yang menerapkan pendidikan anti korupsi yaitu Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban.

Pemilihan kedua madrasah ini berdasarkan pada pengalaman peneliti. Sebelumnya peneliti pernah menjadi salah satu pengajar di Madrasah Aliyah

[8] "Madrasah Dan Pesantren Harapan Utama Pendidikan Akhlak", dalam http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=175848, (Senin, 10 Januari 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo. Peneliti juga merupakan salah satu alumni. Sehingga peneliti akan lebih mudah melakukan penelitian karena peneliti telah mengenal madrasah ini. Sedangkan pemilihan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban sebagai tandingan berdasarkan pada observasi acak ke beberapa sekolah. MA Islamiyah Sunnatunnur memiliki visi dan misi yang sesuai dengan pandangan pendidikan antikorupsi. Serta MA Islamiyah Sunnatunnur jauh lebih berpengalaman sebagai madrasah senior dibanding dengan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo.

Dengan demikian, peneliti akan memfokuskan penelitian ini dengan melakukan studi komparasi terhadap kedua madrasah tersebut. Maka judul dari penelitian ini adalah IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PEMBENTUKAN MORAL SANTRI (Studi Komparasi Antara Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo Dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban).

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis akan mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, tingkah laku, jasmani dan rohani, dan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan akhirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, memperkaya pengalaman masyarakat.
3. Tujuan implementasi pendidikan anti korupsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai pembentukan moral, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan masyarakat.[9]

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah ini agar permasalahan yang dibahas pada penelitian dapat lebih fokus dan konsisten. Adapun pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Penulis membahas tentang implementasi pendidikan anti korupsi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS yang ada di Sidoarjo dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban.
2. Penulis membahas pergeseran orientasi pendidikan yang berkembang pada dewasa ini, hanya diterapkan dalam mencerdaskan saja tanpa membina moralnya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pendidikan anti korupsi dalam pembentukan moral santri di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban ?

[9] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Prespektif Islam*, (Bandung : ROSDA, 2001), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adakah perbedaan dalam implementasi anti korupsi dalam pembentukan moral santri di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian diatas, penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mendeskripsikan implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembentukan moral santri di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban.
2. Mengetahui perbedaan dalam implementasi pendidikan anti korupsi dalam pembentukan moral santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo Dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan pembangunan dan peningkatan khazanah ilmiah dalam dimensi pendidikan Islam di pesantren dan madrasah.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca dan penambahan karya ilmiah perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Sebagai informasi dan pertimbangan dalam menganalisis wacana tentang implentasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan anti korupsi dalam pembentukan moral santri di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo Dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban.

3. Secara Umum, penelitian ini semoga berguna sebagai wacana pemikiran terhadap pendidikan Islam di pesantren dan madrasah tentang persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi masyarakat muslim

F. Penelitian Terdahulu

Agar peneliti mengetahui apakah objek penelitian yang akan dilakukan sudah diteliti atau belum, peneliti melakukan kajian atas penelitian terdahulu, khususnya terhadap penelitian yang relevan dengan tema yang telah dipilih. Sejauh penelusuran yang dilakukan, penelitian yang memfokuskan pada kajian Kurikulum pendidikan antikorupsi sebagai berikut:

1. Skripsi saudara Muhammad Mufid dengan judul, "Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Islam", Yogyakarta: Jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2007. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai pendidikan antikorupsi sebagai solusi alternatif bagi pemberantasan korupsi. Penelitian ini menitik beratkan pembahasan mengenai relevansi antara pendidikan antikorupsi dengan Islam, dan hasilnya terungkap bahwa pendidikan antikorupsi dengan Islam mempunyai relevansi yang sangat terkait. Skripsi ini menjadi landasan penelitian bahwa penanaman nilai-nilai Islami sebagai bentuk implementasi pendidikan antikorupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi saudara Ari Himawan dengan judul Bentuk Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah Atas", PAI (Pendidikan Agama Islam) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2007. Problem dalam skripsi tersebut adalah bentuk integrasi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan. Penelitian ini merupakan salah satu dasar dalam implementasi Pendidikan Antikorupsi yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah secara lebih jelas.
3. Skripsi saudara Bantan Ansori dengan judul Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Tingkat SMA", Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2011. Problem dalam skripsi ini adalah tentang nilai-nilai antikorupsi yang terdapat dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam di tingkat SMA Juga urgensi pendidikan antikorupsi dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam di tingkat SMA. Hasilnya terungkap bahwa nilai - nilai pendidikan antikorupsi dalam buku ajar adalah keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan larangan menyembunyikan kesaksian. Dari skripsi ini, peneliti mendapat pandangan tentang nilai-nilai antikorupsi yang menjdai penilaian terlaksananya pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran termasuk sarana pembelajaran (buku ajar).

Dari skripsi-skripsi tersebut diperoleh landasan tentang pelaksanaan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran di sekolah/madrasah. Sebagai nilai lebih, peneliti juga melakukan studi komparasi antara dua sekolah yang melaksanakan pendidikan antikorupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar dalam pembahasan nanti tidak menimbulkan perbedaan persepsi, maka perlu diberi penegasan terhadap istilah yang digunakan dalam judul skripsi tersebut, antara lain:

1. Implementasi :

   Pelaksanaan, pengerjaan hingga menjadi terwujud[10]

2. Pendidikan Antikorupsi

   Korupsi, Korupsi secara etimologis sesuai dengan bahasa aslinya berasal dari bahasa Latin, corruption dari kata kerja corrumpere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat atau disuap.[11] Terma korupsi secara universal selama ini diartikan sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, berakibat merugikan kepentingan umum dan negara. Bentuk nyata tingkah laku korupsi bisa berwujud penggelapan, penyuapan, penyogokan, manipulasi data administrasi keuangan (termasuk mark up), pemerasan, penyelundupan, jual beli dukungan politik dan perbuatan sejenis lainnya.

   Dari beberapa pandangan definitif di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang berupa penyimpangan kekuasaan dan jabatan, privatisasi fasilitas, penyuapan atau penyogokan, penipuan. Kejahatan korupsi lebih eksplisit lagi karena adanya

---

[10] Dahlan.y al Barry, *Kamus Induk Ilmiah,* (Surabaya: Target Pres, 2003), 306.
[11] Ridlwan Nasir, (Ed.), *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, (Surabaya : IAIN Press & LKiS, 2006), 281-282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian yang diakibatkan dari tindakan korupsi, seperti kerugian uang negara secara materil.

Pendidikan Antikorupsi melalui pendidikan formal dapat dilaksanakan dengan kurikulum yang terdapat di sekolah sekolah, seperti SD, SMP, SMA, maupun PT. Kurikulum menjadi bagian penting dalam menanamkan dan mensosialisasikan nilai nilai antikorupsi, karena di dalamnya sarat dengan pengetahuan dan pengalaman yang harus diberikan dan dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat mencapai out come yang diharapkan.[12] Untuk mencapai out come pada diri peserta didik terhadap perilaku antukorupsi, maka kurikulum harus diformat sedemikian rupa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yakni menghasilkan generasi yang tangguh terhadap godaan korupsi serta mampu menghindarkan diri dari kejahatan korupsi. Mengenai materi pendidikan antikorupsi, secara tegas Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh menyatakan bahwa materi pendidikan antikorupsi tidak akan berbentuk mata pelajaran tersendiri, tetapi akan dimasukkan dalam seluruh mata pelajaran terkait, mengingat kurikulum saat ini sudah sarat beban, sehingga tidak memungkinkan menambah pelajaran baru.[13]

3. Moral :

dapat dikaitkan dengan istilah etik, kesusilaan dan budi pekerti. Moral merupakan nilai tentang baik –buruk kelakuan manusia. Oleh karena itu

[12] Heru Nugroho, *Mungkinkah Pendidikan menjadi Alternatif Pemberantasan Korupsi?* (Yogyakarta: KAUB, LP3 UMY dan Yogya Corruption Watch, 2004), 11.
[13] Abdul Majid Hariadi, "Kurikulum Pendidikan Antikorupsi", dalam www.tribunnews.com, (2 Juni 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

moral berkaitan dengan nilai terutama nilai afektif. Dengan demikian pendidikan moral dapat pula dipersamakan dengan istilah pendidikan etik, pendidikan budi pekerti, pendidikan nilai (value education) atau pendidikan afektif. Ada pula dengan memakai istilah pendidikan watak dan pendidikan akhlak Dalam hal ini istilah-istilah tersebut dapat saling menggantikan. Jadi istilah ini tidak bisa lepas dari pengertian moral, nilai, budi pekerti , watak, akhalak atau afektif itu sendiri.

4. Santri :

adalah julukan bagi orang yang mendalami ajaran-ajaran Islam di sebuah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berasrama (pondok).[14]

H. Metode Penelitian

Langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam menggali data dan menginterpetasi data guna menemukan jawaban permasalahan dan sesuai dengan tujuan penelitian meliputi:

1. Pendekatan Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, fenomenologis dan berbentuk diskriptif. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang menggambarkan isi data yang ada dalam ini adalah kepala madrasah dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Meleong bahwa penelitian deskriptif

[14] Nurcholis Madjid, *Kaki Langit Peradaban*, (Jakarta : Paramadina, 1997), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan.[15]

Menurut Lexy.J.Meleong, metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilaku yang dapat diamati.[16]

Peneliti menggunakan metode kualitatif karena ada beberapa pertimbangan antara lain, menjelaskan menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan ganda, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, metode ini lebih reka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh baersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Orientasi teoritik untuk memahami makna dari kata yang ditemukan sesuai dengan fokus kajian, peneliti menggunakan pendekatan fenomena seperti yang diungkapkan oleh Meleong tentang pendekatan fenomenologis yaitu: yang ditekankan oleh kaum fenomenologis ialah aspek subyektif dari perilaku orang. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari.[17]

Bagi peneliti fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik apaila dilakukan interaksi dengan obyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada obyek dimana fenomena tersebut sedang berlangsung. Oleh karena itu

[15] Lexy.J.Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), 6.
[16] Ibid., 3.
[17] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

observasi, wawancara dan angket dalam penelitian kualitatif merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui wawancara, angket dan observasi ditambah dengan dokumentasi.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah analisa kerja dan aktivitas. Nazir menjelaskan analisa kerja dan aktifitas (job and activity analysis), merupakan penelitian dengan menggunakan metode diskriptif. Penelitian ini ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktifitas dan pekerjaan manusia, dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang.[18]

2. Kehadiran Peneliti dan Lokasi Penelitian

a. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan, karena peneliti sendiri merupakan alat (instrumen) pengumpul data yang utama sehingga kehadiran peneliti mutlak diperlukan dalam menguraikan data nantinya. Karena dengan terjun langsung ke lapangan maka peneliti dapat melihat secara langsung fenomena di daerah lapangan seperti kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.[19]

[18] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 71.
[19] Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian ini sangat tepat, karena ia berperan segalanya dalam proses penelitian.

Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subyek atau informan, dengan terlebih dahulu mengajjukan surat izin penelitian kelembaga yang terkait. Adapun peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat berperan serta yaitu peneliti tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi masih melakukan fungsi pengamatan. Peneliti disini pada waktu penelitian mengadakan pengamatan langsung, sehingga diketahui fenomena-fenomena yang nampak. Secara umum kehadiran peneliti dilapangan dilakukan dalam 3 tahap yaitu:

1) Penelitian pendahuluan yang bertujuan mengenal lapangan penelitian
2) Pengumpulan data, dalam bagian ini peneliti secara khusus menyimpulkan data
3) Evaluasi data yang bertujuan menilai data yang diperoleh di lapangan penelitian dengan kenyataan yang ada.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini peneliti lakukan di di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban. Peneliti menentukan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo Dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban. Sebagai tempat penelitian ini, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pondok dan sekolah ini menerapkan pendidikan antikorupsi sebagai proses dalam pembentukan moral santri.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka menurut Lutfand (1984) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[20] Adapun sumber data dalam hal ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama yaitu kepala sekolah, para pengajar dan staf yang ada di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo Dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang di perlukan oleh data primer. Adapun sumber data sekunder yang diperlukan yaitu: buku-buku, foto dan dokumen tentang di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo Dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban.

4. Prosedur Pengumpulan Data

[20] Ibid., 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama yang relevan dan objektif. Dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki.[21] Metode ini digunakan untuk memperoleh datatentang letak dan keadaan geografis, sarana dan prasarana pendidikan, keadaan pengajar dan siswa serta penerapan pendidikan antikorupsi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo Dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban.

b. Metode Interview

Metode interview adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.[22] Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan menejemen pendidikan antikorupsi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo Dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban. Dan pola yang diterapkan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo Dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban. Dalam hal ini pihak-pihak yang di interview adalah kepala pondok dan sekolah, pengajar dan staf.

c. Metode Dokumentasi

[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach II,* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1994), 136.
[22] Ibid., 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode dokumentasi adalah apabila menyelidiki ditujukan dalam penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu dengan melalui sumber-sumber dokumen.[23] Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum sekolah, sejarah berdirinya dan sebagainya.

d. Metode Angket

Metode angket atau questionaire adalah alat penelitian berupa daftar pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden.[24] Responden adalah orang yang memberikan tangggapan atau menjawab pertanyaan yang diajukan.[25]

Metode ini digunakan untuk mengetahui dan memperoleh data tentang respons santri terhadap penerapan menejemen pembelajaranm pendidikan antikorupsi di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo Dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban.

5. Tehnik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dengan menggunakan suatu metode, karena dalam penelitian ini tidak menggunakan data berupa angka, maka metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana dengan analisis deskriptif berusaha memaparkan secara detail tentang hasil penelitian sesuai dengan data yang berhasil dikumpulkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh

[23] Winarno Surachmad, *Dasar-Dasar Dan Teknik Research,* (Jakarta: Tarsito, 1990), 132.
[24] S. Nasution, *Metode Research* (Bandung: Jemmars, 1991), 169.
[25] Sanapiah Faisal, *Dasar Dan Teknik Menyusun Angket* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suharsimi Arikunto pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitianya tidak perlu merumuskan hipotesa.[26]

Dengan menggunakan metode deskriptif ini, penulis dapat menyajikan data yang ada, yaitu hasil wawancara serta hasil observasi yang diperoleh dari masing-masing madrasah. Kemudian kedua data dianalisis dan dilakukan komparasi (membandingkan) tentang pelaksanaan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran pada masing-masing sekolah. Selanjutnya hasil komparasi dideskripsikan kembali untuk memenuhi tujuan akhir dari tesis ini. Selain itu, diperhatikan juga keberhasilan kedua madrasah dalam proses pembentukan moral santri yang merupakan tujuan penerapan pendidikan antikorupsi itu sendiri.

6. Pengecekan Keabsahan Temuan

Teknik yang digunakan untuk menetukan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Dilakukan dengan memperpanjang waktu penelitian. Dengan memperpanjang keikutsertaan dalam penelitian akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan karena perpanjangan keikutsertaan, peneliti akan banyak mempelajari dan dapat menguji ketidak benaran informasi.

b. Ketekunan Pengamatan

[26] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk memenuhi kedalaman data. Ini berarti bahwa penelitian hendaknya mengadakan pengamatan dengan tekliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemerikasaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[25] Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan melalui sumber lain yaitu WAKA kurikulum.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan melihat semua data dengan realitas yang nampak pada kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan lembaga pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk memeriksa dan melihat kesesuaian data yang diperoleh dengan kegiatan sebenarnya di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo Dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami secara sistematis apa yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan sebagai berikut: untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang tesis ini, maka penulis akan memaparkan dalam sistematika pembahasan yang terdiri atas 5 bab, yaitu:

Bab pertama pendahuluan, Menguraikan latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk membahas masalah penelitian yang penulis rumuskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam suatu rumusan masalah. Dengan demikian penulis mengharapkan dapat diketahuinya tujuan dan keguanaan penelitian kemudian mencakup penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, serta ditutup dengan outline penelitian.

Bab dua kajian pustaka yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab *pertama,* terminologi korupsi antikorupsi, meliputi: apa itu antikorupsi, jenis-jenis korupsi, penyebab korupsi. Sub bab *kedua,* pembelajaran pendidikan antikorupsi, meliputi: pengertian pendidikan korupsi, urgensi pendidikan korupsi, nilai-nilai pendidikan antikorupsi.

Bab ketiga berisi profil Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo dan MA Islammiyah Sunnatunnur Tuban

Bab keempat Analisis Data. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang analisis data penelitian yang di dalamnya menjelaskan tentang implementasi pembelajaran pendidikan antikorupsi dalam pembentukan moral santri di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo dan MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban. Serta mengidentifikasi adanya perbedaan di antara keduanya.

Bab kelima penutup dalam bab ini diuraikan kesimpulan akhir yang penulis peroleh dari penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id